

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- B.Ilyas, Wirawan dan Ricard Burton, 2011, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bohari, 1999, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brotodiharjo, R. Santoso, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djembatan, Jakarta.
- Hartanto, J. Andy, 2015, *Panduan Lengkap Hukum Praktis (Kepemilikan Tanah)*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustofa, 2017, *Tuntunan Pembuatann Akta Tanah (Edisi Revisi)*, Karya Media, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1988, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung.

\_\_\_\_\_, dan Dewi Kania Sugiharti, 2010, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.

Suandi, Erly, 2011, *Hukum Pajak Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sumendro, 2018, “Materi Ajar Manajemen Perkantoran”, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta.

Suparno, 2012, *Hukum Pajak: Suatu Seketsa Asas*, Pustaka Magister, Semarang.

Sutedi, Andrian, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Edisi 1, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Artikel/Jurnal**

Dietrick, John M. dan Bernard T. Loftus, 2003, “Regulatory Basis for Process Validation”. dalam Jurnal *Pharmaceutical Process Validation: Second Edition, Revised and Expanded*, Marcel Dekker Inc, New York.

Rejekiingsih, Triana, 2016, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)”, *Jurnal Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

## **C. Tesis**

Meikaka, Raden Rara Reza Mutiara Pradipta, 2017, “Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantul dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah dan/atau Bangunan”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Suryani, Sapta Febriani Anugrah, 2017, “Implementasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Dikaitkan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan atau Bangunan di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

#### D. Situs Internet

Artikel berjudul “Dilewati KRL, Harga Tanah Bekasi Cikarang Naik” yang diunggah pada tanggal 10 September 2017, diakses dalam laman web: <https://finance.detik.com/properti/d-3636723/dilewati-kr1-harga-tanah-bekasi-arah-cikarang-merangkak-naik>, pada tanggal 16 November 2018, Pukul 11.32 WIB.

Artikel berjudul “Kawasan Industri Cikarang Terbesar di Asia Tenggara” yang diunggah pada tanggal 29 Agustus 2017, diakses dalam laman web: <https://finance.detik.com/advertorial-news-block/d-3619600/kawasan-industri-cikarang-terbesar-di-asia-tenggara>, pada tanggal 16 November 2018, Pukul 11.28 WIB.

Artikel dengan judul “Mutual Trust dan Integrasi Data Modal Utama Reformasi Pajak”, diakses dalam website: [https://mucglobal.com/publication/newsletter/read/509/Mutual Trust dan Integrasi Data Modal Utama Reformasi Pajak](https://mucglobal.com/publication/newsletter/read/509/Mutual%20Trust%20dan%20Integrasi%20Data%20Modal%20Utama%20Reformasi%20Pajak), yang diakses pada tanggal 06 Mei 2019, pukul 21.06 WIB.

Edi Suwiknyo, artikel berita berjudul “Perdirjen Pajak Nomor PER-18/2017-Ditolak Kalangan Pembuat Akta Tanah”, diakses melalui laman web: <http://jakarta.bisnis.com/read/20171211/10/717018/perdirjen-pajak-nomor-per-182017-ditolak-kalangan-pembuat-akta-tanah>, pada tanggal 18 November 2018, Pukul 14.01 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Notaris Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan”  
Data diakses melalui website: [https://gopublicidxcoid.files.wordpress.com/2016/06/bei\\_panduanipo\\_notaris.pdf](https://gopublicidxcoid.files.wordpress.com/2016/06/bei_panduanipo_notaris.pdf), pada tanggal 16 November 2018, Pukul 11.32 WIB.

## **E. Undang-Undang/Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 1.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2017.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2018.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibuat di Jakarta, tertanggal 9 Desember 2016, Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016.

Surat Edaran Nomor SE-40/PJ/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 18/PJ/2017 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 29 November 2017.